

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Keuangan negara meliputi semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kebijakan dan kegiatan dalam bidang fiskal, moneter dan pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan, serta segala sesuatu baik berupa uang, maupun barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan hak dan kewajiban tersebut. Apabila keuangan Negara tidak dikelola dengan baik maka konsekuensi tujuan negara tidak akan tercapai dan kemakmuran masyarakat tidak terpenuhi. Setiap pengguna harus disahkan, dipertanggungjawabkan dan diawasi oleh lembaga pengawasan yang diatur undang-undang.

Pemerintah sebagai lembaga Negara yang mengelolah keuangan Negara, menyusun anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) setiap tahun dalam rangka penyelenggaraan fungsi pemerintah untuk mencapai tujuan bernegara.

Anggaran pendapatan dan belanja Negara harus dikelola secara baik dan bertanggungjawab sesuai kaidah umum praktek penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik. Sesuai dengan undang-undang nomor 07 tahun 2021 tentang keuangan Negara, dijelaskan bawah fungsi alokasi mengandung arti anggaran Negara yang diarahkan untuk mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya serta meningkatkan efisiensi dan efektifitas perekonomian, fungsi distribusi mengandung arti bahwa kebijakan anggaran Negara harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan dan fungsi stabilisasi mensyaratkan

penggunaan pemerintah sebagai alat untuk mencoba mempertahankan keseimbangan ekonomi fundamental.

Keuangan daerah adalah segala hak dan kewajiban keuangan daerah, termasuk segala bentuk kekayaan yang berkaitan dengan dan kewajiban tersebut, dalam penyelenggaraan pemerintah daerah. Pengertian keuangan daerah sebagai mana dimulai dalam penjelasan pasal 156 ayat 1 undang-undang nomor 1 tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah sebagai berikut “Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang dan segala sesuatu berupa yang dapat dijadikan milik daerah yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

Kemampuan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya tercermin dalam APBD yang secara langsung atau tidak langsung mencerminkan kemampuan daerah untuk membiayai pembangunan, pelayanan sosial masyarakat, dan tugas-tugas pemerintah . penyelenggaraan kemampuan pemerintah idealnya dilakukan dengan asumsi bahwa penyelenggaraan pemerintah dilatarbelakangi dengan memberikan sumber-sumber pendapatan yang memadai kepada daerah, yang mengacu kepada undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang perimbangan keuangan pemerintah daerah, yang banyak diubah dan diselesaikan dengan membagi kekuasaan antara pusat dan daerah.

Berdasarkan sumber-sumber penerimaan daerah adalah pendapatan daerah dan pembiayaan pendapatan daerah terdiri dari:

1. Pendapatan asli daerah (PAD),
2. Dana perimbangan

### 3. Lain-lain pendapatan

Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah (PKPD) merupakan mekanisme transfer pemerintah pusat dan daerah terdiri dari :

1. Dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam (DBHP dan SDA),
2. Dana alokasi umum (DAU),
3. Dana alokasi khusus (DAK).

Dana pembiayaan daerah berasal dari pinjaman daerah, privatisasi kekayaan daerah terpisah, sisa dana APBD (SAL), dan dana cadangan daerah. Karena bersumber dari pengelolaan fiskal daerah, besaran pendapatan asli daerah (PAD) dan pembiayaan daerah dapat dikategorikan sebagai dana non PKPD. Khusus pinjaman daerah pemerintah pusat masih khawatir dengan kondisi utang negara, sehinggalbelum mengizinkan penerbitan utang daerah.

Sumber penerimaan daerah yang digunakan untuk pendanaan pemerintah daerah menurut undang-undang Nomor 1 tahun 2022 dalam pelaksanaan desentralisasi meliputi :

1. Pendapatan asli daerah (PAD),
2. Dana alokasi khusus (DAK),
3. Dana alokasi umum ( DAU),
4. Dana bagi hasil ( DBH),
5. pinjaman daerah dan lain-lain penerimaan yang sah.

Penerimaan daerah tersebut diharapkan menjadi pendorong untuk pertumbuhan dan berkembangnya suatu perekonomian didaerah tersebut.

Dengan demikian tingkat penerimaan daerah yang tinggi akan dapat mempengaruhi peningkatan pertumbuhan ekonomi (PDRB).

## **1.2. Masalah Pokok Laporan**

Berdasarkan judul dan latar belakang yang telah ditemukan, terdapat adanya permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana Mekanisme Pencatatan Penerimaan Dan Pelaporan Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum (Mineral Dan Batubara) Pada Badan Pengelolaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi Jambi?
2. Bagaimana Cara Mengetahui Besaran Penerimaan Dana Bagi Hasil Pertambangan Umum Provinsi Jambi?

## **1.3. Tujuan dan Manfaat Penulis**

### 1.3.1 Tujuan Penulis

Berdasarkan rumusan masalah pokok laporan, tujuannya dari penulis ini adalah:

1. Untuk mengetahui mekanisme pencatatan penerimaan dan pelaporan dana bagi hasil pertambangan umum (mineral dan batu bara).
2. Untuk mengetahui besaran penerimaan dana bagi hasil pertambangan umum (mineral dan batu bara).

### 1.3.2. Manfaat penulis

Kegunaan penulisan tugas akhir ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut :

#### A. Manfaat Untuk penulis

1. Membentuk kedisiplinan dan kepribadian yang bertanggungjawab dalam dunia kerja.
2. Menambah pengetahuan serta wawasan mengenai pencatatan penerimaan dan pelaporan dana bagi hasil.

3. Sebagai syarat bagi penulis untuk menyelesaikan Program Studi Diploma III Perpajakan Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Jambi.

#### B. Manfaat Untuk Instansi

1. Mampu membina kerja sama antara instansi dengan lembaga pendidikan.
2. Memberikan kontribusi yang baik terhadap mahasiswa magang sebagai bentuk partisipasi yang nyata diberikan instansi.

#### C. Manfaat Untuk Universitas Jambi

Sebagai tambahan referensi bagi mahasiswa yang menyusun tugas akhir yang berkaitan dengan penulis ini.

#### D. Manfaat Untuk Pembaca

Untuk menambah wawasan dan pengetahuan tentang pencatatan penerimaan dan pelaporan dana bagi hasil pertambangan umum.

### **1.4. Metode Penulisan**

Dalam metode pengumpulan data, data dapat diperoleh dari beberapa sumber, yang terdiri dari:

#### 1.4.1. Jenis Data

##### 1. Data Primer

Data Primer Yaitu merupakan data yang dikumpulkan atau diperoleh langsung dilapangan sebagai objek penulisan dan sumbernya diamati dan dicatat untuk pertama.

##### 2. Data Sekunder

Data yang diperoleh melalui studi literatur seperti dari pihak instansi serta dari buku, internet, artikel, undang-undang.

#### 1.4.2. Metode Pengumpulan Data

##### 1. Observasi

Observasi merupakan metode pengumpulan data yang dilakukan untuk mengamati dan meninjau secara langsung kelapangan dalam waktu singkat dan bertujuan untuk memperoleh data dan informasi tentang sejumlah permasalahan dalam objek penelitian dana bagi hasil pertambangan umum (mineral dan batubara)

##### 2. Wawancara

Wawancara adalah teknik pengumpulan data dimana penulis mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang sesuatu kepada informan untuk memperoleh informasi yang diharapkan.

#### 1.4.3. Metode Analisis Data

Data yang telah dikumpulkan selama penulisan disusun sesuai dengan kebutuhan analisis dan selanjutnya dianalisis dengan metode deskriptif, yaitu dengan membandingkan dengan teori yang ada dan akhirnya diambil suatu kesimpulan. Metode ini bertujuan untuk mempermudah penafsiran dan penjelasan dengan analisis tabel, grafik, dan diagram.

### **1.5. Waktul Dan Tempat Magang**

Adapun waktu dan lokasi dalam pelaksanaan magang

Waktu : 2 (dua) bulan yaitu tanggal 09 februari – 10 april 2023

Lokasi : Badan Pengelolahaan Keuangan Dan Pendapatan Daerah Provinsi  
Jambi

Alamat : Jl. Jenderal Sudirman No. 117 Thehok, Jambi Selatan Kota Jambi,  
36138

Telepon : 074124452

## **1.6. Sistematika Penulisan**

### **BAB I : PENDAHULUAN**

Pada bab ini penulis menguraikan tentang latar belakang masalah pokok laporan, tujuan dan manfaat penulis, metode penulisan yang meliputi jenis data, metode pengumpulan data, dan metode analisis, waktu magang.

### **BAB II : TINJAUAN PUSTAKA**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang tinjauan pustaka yang mencakup semua hal yang berkaitan dengan topik penulisan.

### **BAB III : PEMBAHASAN**

Pada bab ini penulis menjelaskan tentang gambaran umum lokasi magang dan menganalisis identifikasi sesuai kegiatan yang menjadi sarana dengan teori identifikasi masalah, serta penjelasan-penjelasan yang terkait dengan judul yang diteliti.

### **BAB IV : KESIMPULAN DAN SARAN**

Pada bab ini berisi ringkasan dari permasalahan beserta pemecahan masalah dan saran-saran dari penulis mengenai segala sesuatu dengan yang masih perlu ditingkatkan guna untuk memperbaiki dimasa yang akan datang

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**